



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 80 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004](#) tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan ...

17. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020](#) tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. [Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020](#) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020](#) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020](#) tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
26. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan ...

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
30. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 80);

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/Menkes/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 serta Penerapan Protokol Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 1 selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setiap pengunjung yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan vaksinasi.
- (3) Bagi pengunjung dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall atau supermarket dan hypermarket wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.
- (4) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun yang akan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama khusus bagi anak usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun.

(5) Pengelola ...

- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (6) Pengelola supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (7) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (8) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. waktu operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - b. waktu operasional untuk toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - c. waktu operasional untuk toko swalayan mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - e. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - f. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - g. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan *café* yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
 - h. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - i. waktu

- i. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB; dan
 - j. waktu operasional layanan *drive thru* untuk restoran dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (9) Kapasitas pengunjung toko swalayan, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas gedung/ruangan.
- (10) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan *café* yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat (*dine in*) dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen) dengan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (11) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan pengunjung paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (12) Setiap pengunjung dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun yang masuk ke restoran, rumah makan, dan cafe wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.

(13) Bioskop ...

(13) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
- b. kapasitas pengunjung paling banyak 100% (seratus persen);
- c. pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi pertama khusus bagi anak usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun;
- d. pengunjung dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*;
- e. restoran/rumah makan dan café di dalam area bioskop diizinkan menerima *dine in*, dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen); dan
- f. wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(14) Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diperbolehkan dengan ketentuan kapasitas pengunjung paling banyak 100% (seratus persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, penanggungjawab hotel wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Penanggungjawab ...

- (2) Penanggungjawab hotel wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (4) Bagi tamu hotel dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.
- (5) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (6) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 100% (seratus persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. kegiatan *meeting, incentives, conferencing* dan *exhibitions* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (7) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB.
- (8) Untuk kegiatan restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen).
- (9) Fasilitas *spa/massage/pijat/refleksi* di hotel diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen).
- (10) Fasilitas pusat kebugaran/*gym* di hotel diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen).

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selama pandemi Covid-19, kegiatan di lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni diperbolehkan dengan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Waktu operasional lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (3) Lokasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saung Angklung Mang Udjo.
 - b. Kebun Binatang Bandung;
 - c. Trans Studio Bandung;
 - d. Karang Setra;
 - e. Kiara Artha Park; dan
 - f. Taman Lalu Lintas.
- (4) Kapasitas pengunjung lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas lokasi wisata.
- (5) Kapasitas pengunjung area publik dan taman umum paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Kapasitas pengunjung museum dan galeri seni paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- (7) Pengunjung dibatasi paling lama 2 (dua) jam untuk berada pada lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni.
- (8) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni dengan didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
- (9) Pengunjung ...

- (9) Pengunjung lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.
 - (10) Selama pelaksanaan PPKM Level 1, Kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a. karaoke;
 - b. pub;
 - c. bar;
 - d. klab malam; dan
 - e. bola sodok/bilyard.
 - (11) Kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
 - (12) Pengunjung Jasa Usaha Pariwisata Hiburan dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.
 - (13) Kapasitas kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruangan.
 - (14) Waktu operasional Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan yaitu mulai buka pukul 16.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1, kegiatan Olahraga dapat dilaksanakan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengelola sarana olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi pengunjung dan/atau pegawai pada sarana olahraga.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun yang masuk ke sarana olahraga wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.
- (4) Setiap orang wajib menggunakan masker selama berada dalam sarana olahraga atau melakukan aktivitas olahraga kecuali aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga.
- (5) Kompetisi olahraga pada tempat penyelenggaraan di wilayah Daerah Kota dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat penonton;
 - c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadion wajib sudah divaksinasi *booster* atau vaksinasi lengkap;
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (6) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam sarana olahraga dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen) dengan wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(7) Pengguna ...

- (7) Pengguna sarana olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak.
- (8) Ketentuan mengenai kapasitas, waktu dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa/*massage* diperbolehkan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan diperbolehkan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pengelola fasilitas atau penanggungjawab Kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa/*massage* dan kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (4) Kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa/*massage* dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (5) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.

(6) Kapasitas ...

- (6) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di luar ruangan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas *venue*/tempat kegiatan.
- (7) Ketentuan mengenai waktu dan teknis kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- (8) Kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan diperbolehkan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Kapasitas kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di dalam ruangan, dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan.
- (10) Kapasitas kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di luar ruangan, dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas *venue*/tempat kegiatan.
- (11) Kegiatan/aktivitas usaha *gym* diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a. kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan;
 - b. waktu operasional *gym* ditetapkan yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - c. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta *screening periodic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (12) Kegiatan latihan seni budaya diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) orang per sesi latihan dengan kapasitas ruangan minimal untuk 100 (seratus) orang.

(13) Setiap ...

(13) Setiap orang dengan usia di atas 18 (delapan belas) tahun yang masuk ke tempat kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa/*massage*, kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya dan gym wajib sudah melakukan vaksinasi *booster*.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (10), ayat (11), ayat (13) dan ayat (14) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (7) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (10), ayat (11), ayat (13) dan ayat (14) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (8) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. catatan Kepolisian; atau
 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) sampai dengan ayat (10), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan yang dilanggar.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002